

## **Sosialisasi pengurusan dokumen ekspor impor bagi pelaku UMKM di Kabupaten Belu**

**Paulina Yuritha Amtiran, Yosefina K. I. D. D. Dhae, Jhimi Y. Maima, Vincentius R. R. Pati Baran, Ludvina Lima**

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Corresponding author : Paulina Yuritha Amtiran

Email : paulinaamtiran@staf.undana.ac.id

Diterima: 08 Oktober 2024 | Direvisi: 14 Januari 2025 | Disetujui: 14 Januari 2025 | Online: 17 Januari 2025

© Penulis 2025

### **Abstrak**

Perdagangan lintas batas berada di perbatasan dua negara, dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, karena pembangunan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini menjadi peluang bagi UMKM di wilayah perbatasan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hasil pengamatan menunjukkan masih banyak pelaku UMKM di wilayah perbatasan belum mengetahui mekanisme pengurusan dokumen ekspor impor agar dapat memasarkan produk mereka. Masalah lainnya adalah sebagian besar pelaku UMKM tidak membuat laporan keuangan sederhana. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Manfaat dari kegiatan ini adalah agar pelaku UMKM dapat memahami mekanisme pengurusan dokumen ekspor impor dan dapat membuat laporan keuangan sederhana. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi dengan pelaku UMKM dan Pengelola PLBN Mota'ain. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah para pelaku UMKM di daerah perbatasan mengetahui dan memahami proses pembuatan dokumen ekspor dan impor untuk meningkatkan pendapatan mereka dan pembuatan laporan keuangan sederhana.

**Kata Kunci** : ekspor; impor; laporan keuangan; sosialisasi; UMKM

### **Abstract**

Cross-border trade on the border of two countries can have an impact on improving the economy of the people in the region, because the development of border areas is currently being carried out with a development approach and empowerment of people in border areas with the aim of increasing their income. This is an opportunity for MSMEs in border areas to increase their income. However, there is still a problem where MSMEs in border areas do not yet know the mechanism for managing export-import documents in order to market their products. The purpose of this activity is to provide socialization and assistance to MSME actors in the border areas of Indonesia and Republic Democratic Timor Leste. The methods used are preparation, implementation and reporting. The result of this community service activity is that MSME actors in the border areas know and understand the process of making export and import documents to increase their income.

**Keywords** : export; financial statement; impor; MSME; socialization

---

## PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan. Kegiatan perdagangan internasional ditopang oleh dua kegiatan utama, yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan/atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri oleh eksportir (penjual) sedangkan impor merupakan kegiatan membeli oleh importir (pembeli) yang nilai perdagangannya akan menjadi devisa ekspor bagi negara yang melakukan ekspor (Marfiana et al., 2022). Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, keterbukaan, dan keadilan. Seperti halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka.

Perdagangan lintas batas berada di perbatasan dua negara, dapat memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, karena pembangunan kawasan perbatasan saat ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Untuk itu berbagai aktivitas di sektor ekonomi terus ditingkatkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu wilayah perbatasan Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste. Perbatasan antar negara di NTT terletak di tiga (3) kabupaten yaitu Belu, Kupang, dan Timor Tengah Utara (TTU). Perbatasan antarnegara di Belu terletak memanjang dari utara ke selatan bagian Pulau Timor, sedangkan Kabupaten Kupang dan TTU berbatasan dengan salah satu wilayah Timor Leste, yaitu Oekusi, yang terpisah dan berada di tengah wilayah Indonesia (*enclave*). Garis batas antarnegara di NTT ini terletak di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Kupang, 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten TTU, dan 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Belu.

Guna mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah terutama perekonomian di kawasan perbatasan. Salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta usaha pada kuartal pertama 2021 dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun. Melihat potensi peningkatan perekonomian yang besar tersebut, pemerintah menaruh perhatian khusus pada UMKM di Indonesia dan terus berupaya untuk memberdayakan mereka di berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Belu tahun 2021 jumlah UKM yang terdapat di Kabupaten Belu berjumlah 18.917 UKM dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan.

Untuk tetap menjaga keberlanjutan usaha dari UMKM pemerintah mendorong dan mengupayakan berbagai potensi UMKM untuk mendukung optimalisasi potensi perekonomian pada kawasan perbatasan. Sebagai wujud perhatian dari pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas usaha dari pelaku UMKM berbagai upaya dilakukan. Banyak dari pelaku UMKM yang yakin bahwa usahanya mampu bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas, namun memiliki modal yang terbatas. Sejumlah UMKM juga masih belum tersentuh oleh lembaga keuangan, sehingga banyak pelaku usaha memilih untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro walaupun dengan beban dan risiko yang cukup berat.

Azzahra, (2023) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu penyebab sektor UMKM sulit melakukan ekspor permasalahan legalitas serta informasi mengenai informasi agar dapat melakukan ekspor. Salah satu masalah lain pelaku UMKM di wilayah perbatasan adalah kurangnya efisiensi serta channel untuk distribusi barang, terutama bagi pelaku UMKM yang hendak memasarkan produknya ke negara lain dan ketidaktahuan mereka tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor sehingga mereka memasarkan produk mereka melalui cara yang tidak sesuai dengan aturan. Sementara hasil penelitian Amtiran et al., (2022) ditemukan bahwa masih kurangnya sosialisasi serta pendampingan

terhadap UMKM menyebabkan para pelaku UMKM di Kabupaten Belu belum maksimal dalam mengembangkan usaha mereka dan hanya sekedar berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di perbatasan Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) terus mengalami perkembangan yang positif. UMKM di wilayah perbatasan telah menjadi motor penggerak utama bagi masyarakat setempat dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun disisi lain muncul masalah yang dihadapi pelaku UMKM di wilayah perbatasan ini antara lain : (a) keterbatasan akses pembiayaan, (b) kurangnya efisiensi serta *channel* untuk mendistribusikan produk mereka terutama bagi pelaku UMKM yang hendak memasarkan produknya ke negara tetangga, (c) masih rendahnya literasi aspek legalitas dan perizinan mulai dari persyaratan hingga proses yang ditempuh dalam pengurusannya, dan (d) sebagian besar pelaku UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan sehingga menyulitkan mereka dalam menghitung omset, pendapatan dari usaha mereka.

Berangkat dari permasalahan dan hasil penelitian tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan pengurusan dokumen ekspor/impor bagi UMKM di wilayah perbatasan dalam mendistribusikan produk mereka ke negara tetangga.

## METODE

Kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Ekspor Impor Bagi Pelaku UMKM dilakukan di Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) Mota'ain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Mei 2023. Mitra kegiatan ini adalah Pengelola PLBN Mota'ain yang membantu untuk mengkoordinir peserta pelatihan ini. Pintu Lintas Batas Negara Mota'ain diresmikan pada 28 Desember 2016. Keberadaan PLBN Mota'ain sangat penting karena merupakan pintu masuk dan keluarnya orang dan barang dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi PLBN tidak hanya dari aspek kepabeanan, keimigrasian saja tetapi mencakup aspek yang lebih luas meliputi pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan politik. Peserta kegiatan ini terdiri dari pelaku UMKM, Pengelola PLBN Mota'ain, Imigrasi, Bea Cukai dan TNI/Polri yang berjumlah 50 orang.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, tim melakukan survei awal untuk mengidentifikasi profil peserta kegiatan dengan mengumpulkan data tentang sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor. Materi yang akan disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi peserta, yaitu pentingnya dokumen ekspor impor, jenis-jenis dokumen ekspor impor, proses dan prosedur melakukan ekspor impor dan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan analisis situasi sebelumnya dan permasalahan yang ada, maka solusi yang ditawarkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pengetahuan dan pemahaman pengurusan dokumen ekspor impor bagi pelaku UMKM yang ada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bentuk kegiatan yang dilakukan adalah:

- Memberikan sosialisasi pentingnya pengurusan dokumen ekspor impor, jenis-jenis dokumen ekspor impor.
- Memberikan sosialisasi proses dan prosedur melakukan ekspor impor.
- Memberikan sosialisasi pembuatan dan penyusunan laporan keuangan.

Berikut tahapan – tahapan dari pelaksanaan kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Ekspor Impor Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Belu :

- 1) Persiapan ; pada tahap ini tim PKM melakukan survei lapangan, identifikasi serta analisis masalah tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia – Republik Demokratik Timor Leste sehingga dapat memberikan solusi yang tepat yang disesuaikan dengan karakteristik setempat.
- 2) Pelaksanaan ; pada tahap pelaksanaan kami menggunakan dua (2), yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Metode ceramah dilakukan untuk memberikan sosialisasi literasi aspek legalitas pengurusan dokumen ekspor impor serta pembuatan dan penyusunan laporan

keuangan sederhana. Metode diskusi dilakukan untuk mengetahui umpan balik dan kendala-kendala yang ditemui oleh para pelaku UMKM.

- 3) Pelaporan ; pada tahap ini tim PKM membuat laporan hasil kegiatan PKM yang terdiri dari solusi dan tindak lanjut kegiatan seperti pendampingan dalam pembuatan perizinan dokumen ekspor impor serta pembuatan laporan keuangan sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Sosialisasi Pengurusan Dokumen Ekspor Impor Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Belu dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Kabupaten Belu. Fokus permasalahan adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku UMKM terutama berkaitan dengan kegiatan ekspor hasil produk mereka ke negara tetangga Timor Leste. Ketidaktahuan terhadap regulasi dan aturan ini tentunya menjadi hambatan dan tantangan bagi pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produk mereka.

### Sosialisasi Pengurusan Dokumen Ekspor Impor

Salah satu masalah yang dialami oleh pelaku UMKM di wilayah perbatasan adalah kurangnya literasi aspek legalitas dan perizinan tentang masuk dan keluarnya orang dan barang dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan literasi pelaku UMKM tentang mekanisme pengurusan dokumen ekspor impor tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Kemudahan Pengurusan Dokumen Ekspor Pelaku UMKM.  
Untuk memudahkan para pelaku usaha di wilayah perbatasan agar dapat mengembangkan usahanya terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang perlu dilakukan, antara lain :
  - 1) pemberian fasilitas fiskal berupa pembebasan bea masuk serta PPN dan PPNBM yang tidak dipungut kepada pelaku UMKM. Dampak dari kebijakan tersebut adanya peningkatan daya saing dari para pelaku usaha yang ada di wilayah perbatasan.
  - 2) memberikan skema persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas serta prosedur kepabeanan ; kebijakan ini diberikan bagi pelaku UKM yang melakukan kegiatan ekspor impor. Fasilitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 (Kemenkeu, 2019).
  - 3) membuat saluran impor dan ekspor bahan baku dan hasil UKM melalui Pusat Logistik Berikat yaitu tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
- b. Upaya Yang dilakukan untuk Meningkatkan Potensi Ekspor UKM.  
Materi ini menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan potensi ekspor UKM terutama dalam jangka pendek, antara lain : (1) perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perijinan terintegrasi online single submission ; (2) fasilitas insentif perpajakan dan (3) pengembangan vokasi.

Dari kegiatan ini terdapat beberapa solusi yang diberikan , antara lain :

- a. Peningkatan pemahaman peserta tentang aspek legalitas dan perizinan dokumen ekspor impor. Peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai mekanisme pengurusan perizinan dokumen ekspor impor sehingga mereka dapat memasarkan produk mereka ke negara Timor Leste.
- b. Peningkatan pemahaman peserta pelatihan tentang fungsi dan tugas Bea Cukai dalam mengasistensi kegiatan ekspor dalam segala aspek mulai dari pencarian pasar, pegurusan izin hingga pelaksanaan teknis ekspor.
- c. Peningkatan pengetahuan peserta tentang peran pengusaha mikro dalam program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

- d. Pelaksanaan kebijakan jangka pendek yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perbankan melalui ; perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perizinan terintegrasi, fasilitas insentif perpajakan, pengembangan vokasi.

### Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana

Selanjutnya pemberian materi tentang pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sederhana bagi pelaku UMKM.

- a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang pentingnya pembuatan laporan keuangan bagi usaha mereka.
- b. Peserta pelatihan dapat membuat laporan keuangan sederhana untuk usaha mereka.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pengurusan dokumen ekspor dan impor kepada pelaku UMKM dapat disimpulkan : 1). Melalui kegiatan PKM ini pelaku UMKM memberikan respon positif mengenai pentingnya mengetahui mekanisme pengurusan dokumen ekspor dan impor bagi keberlanjutan usaha mereka; 2). Melalui kegiatan PKM ini pelaku UMKM memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan bagi usaha mereka; 3). Mitra dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di wilayah perbatasan sehingga mereka dapat memberikan pendampingan tentang prosedur pengurusan dokumen ekspor impor; 4). Terjadinya sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kabupaten Belu agar dapat memberikan kemudahan bagi pengembangan usaha kecil menengah yang ada serta memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki (baik sumber daya manusia dan sumber daya alam) oleh Kabupaten Belu.

Pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku UMKM secara komprehensif melalui peningkatan kapasitas SDM, kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya, dan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan sederhana. Selain itu implementasi kebijakan atau metode yang tepat untuk meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi sehingga tidak merugikan para pelaku UMKM terutama yang berada di kawasan perbatasan Indonesia – Timor Leste.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amtiran, P. Y., U.T. Anabuni, A., & S. Neno, M. (2022). Cross Border Trade: Strategy and Policy (Evidence from Cross-Border Trade in the Republic of Indonesia and the Republic Democratic of Timor Leste). *GATR Journal of Business and Economics Review*, 7(3), 169–177. [https://doi.org/10.35609/jber.2022.7.3\(2\)](https://doi.org/10.35609/jber.2022.7.3(2))
- Azzahra, A. A. (2023). Strategi Tingkatkan Ekspor Indonesia dengan Modal Sosial antara UMKM dan Eksportir Muda. *Prosiding Seminar Nasional*, 1079–1090.
- Kemendag. (2020). *Permendag Nomor 51 Tahun 2020 TENTANG PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR SETELAH MELALUI KAWASAN PABEAN (POST BORDER)*.
- Kemenkeu. (2019). *PMK No 110/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR .. BARANG DAN/ATAU BAHAN, DAN/ATAU MESIN YANG DIIAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGA*.
- Marfiana, A., Asqolani, Nurcahyo, M. A., Fachrudin, M., Nugroho, A. S., & Fuady, M. S. (2022). Modul UMKM: Program Siap Ekspor. In *Politeknik Keuangan Negara STAN: Vol. (Issue)*. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Muhammad Faiz Subhanulfikri, R. M. A. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha dalam Pengembangan UMKM di Desa Kedungdalem Kabupaten Probolinggo. *Kurnia*, 2(3), 76–87.

- <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Karunia/article/view/1143>
- Nurhakim, K., & Satar, M. (2015). Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Ekspor barang. *Jurnal Industri Elektro Dan Penerbangan*, 5(2), 16–21. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/indept/article/view/155/126>
- Prihanto, H., Usmar, U., Selfiani, S., Adwimurti, Y., & Sismiati. (2024). *Edukasi Dan Sosialisasi Ekspor Dan Impor Pada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif dan PKK di Depok Jawa Barat Education And Socialization Of Export And Import To Creative Economy and PKK Business Actors in Depok , West Java Universitas Prof Dr Moestopo Beragama*. 1(1), 18–23.
- Sani, I., & Nanda Lubis, S. (2022). Proses Pengurusan Dokumen Barang Ekspor Pada Pt.Bahari Eka Nusantara Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 358–363. <https://doi.org/10.54196/jme.v4i1.70>
- Verawati, K., & Rahmayanti, H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pelatihan Ekspor Pada Kelompok Umkm Dan Smk Di Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Widya Laksana*, 10(2), 234. <https://doi.org/10.23887/jwl.v10i2.29515>
- Yusri, A. Z. dan D. (2016). Lembaga Jasa Keuangan. In *Otoritas Jasa Keuangan*.